PROBLEMATIKA INDEPENDENSI HAKIM SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN

Adinda Thalia Zahra¹, Aditia Sinaga², Muhammad Rafli Firdausi³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: aditiasinaga13@students.unnes.ac.id¹, raflibagus879@students.unnes.ac.id², adindathaliaaa@students.unnes.ac.id³

Abstrak

Penulisan karya ini bertujuan untuk membagi pemikiran kepada masyarakat luas tentang persoalan independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Tulisan berfungsi sebagai alat hukum bagi hakim untuk menjalankan perannya dalam mengadili dan mengambil keputusan dalam suatu perkara sehingga tidak terpengaruh oleh campur tangan atau pengaruh dari kalangan kekuasaan lain, baik yang berada di dalam organ internal kekuasaan eksekutif maupun di dalam organ kekuasaan eksekutif. Meskipun norma agama dijadikan pedoman dalam pasal ini karena diketahui bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya cukup patuh terhadap norma, namun temuan menunjukkan bahwa hakim tetap mengambil keputusan di Indonesia guna menyelidiki dan menemukan rasa keadilan dalam masyarakat.

Kata kunci: Kekuasaan Kehakiman, Sistem Peradilan, Independensi Hakim.

Abstract

The purpose of writing this work is to share thoughts with the general public regarding the issue of the independence of judges as the executors of judicial power. Writing functions as a legal tool for judges to carry out their role in adjudicating and making decisions in a case so that they are not affected by interference or influence from other power groups, both within the internal organs of executive power and within the organs of executive power. Even though religious norms are used as guidelines in this article because it is known that Indonesian people are generally quite obedient to norms, the findings show that judges still make decisions in Indonesia to investigate and find a sense of justice in society.

Keywords: *Judicial Power, Judicial System, Judge's Independence.*

PENDAHULUAN

Menurut Shetreet S. & J. Deschnes, meskipun konsep independensi peradilan (maka disebut independensi) telah lama dianggap penting dalam sistem peradilan, namun kenyataannya tidak banyak mendapat perhatian. Konsep independensi lembaga peradilan banyak menarik perhatian dan menjadi topik penelitian. Sejak lahirnya konsep negara hukum, independensi hakim menjadi subyek sengketa konstusionalis yang berlarut-larut (Utama & Saraswati, 2021).

Argumen yang mendukung dan menentang pemberian kebebasan kepada hakim datang dari para pragmatis yang bekerja dengan sekolah-sekolah progresif. Pendukung positivisme dan penganut pragmatisme menginginkan hakim bertindak sebagai terompet dan corong hukum (Bouche De Laloi), Namun, pendukung sekolah progresif memperjuangkan kebebasan hakim, yang tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga legislator dan inovator

(Rechtsvinding dan Rechtsvorming). Karena pada masa itu hakim yang diangkat oleh raja berasal dari kalangan feodal, mereka terpaksa menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh sistem feodalisme, dan dalam konteks negara dan pemerintahan yang bersifat pragmatis dan positivistik yang berbasis pada pengetahuan tentang feodalisme.

Hakim tidak punya pilihan selain mematuhi perintah di lingkungan ini. Namun, para pendukung ideologi progresif terus-menerus menganjurkan dan memperjuangkan hakim untuk independen dalam menjalankan tugas peradilan demi menegakkan hukum yang adil sesuai dengan norma-norma keutamaan. Hakim berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui pengadilan negeri. Hakim bukan sekadar silogisme "terompet" atau "corong" hukum; mereka juga pelaksana hukum, pencipta (dalam hal penemuan hukum yudisial), dan mampu menciptakan hukum yang sah. Akibatnya, para hakim harus terikat oleh hukum dalam arti pembatasan legislatif yang signifikan untuk kepentingan minoritas yang berkuasa.

Tugas kehakiman hakim harus diberikan keleluasaan agar setiap perkara yang dihadapinya dapat diputus sesuai dengan pemeriksaan, persidangan, dan penyelesaian perkara yang dihadapinya, serta dapat mengambil pilihan yang adil dan berpengetahuan. Perlindungan hukum diperlukan untuk menjamin kebebasan hakim, memungkinkan mereka untuk berfungsi tanpa campur tangan dari kekuasaan negara atau pemerintah, intimidasi dari kekuatan koersif lainnya, atau ancaman yang merusak secara psikologis baik selama persidangan maupun setelah putusan dijatuhkan. Hakim dianggap sebagai penegak hukum yang efektif karena mereka adalah penerjemah hukum yang dapat dipercaya/terampil dalam menafsirkan hukum dan cerdas dalam menilai dan menerapkan keadilan. Hal ini karena hakim dijamin secara hukum untuk menjalankan tugas peradilan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi literatur di perpustakaan hukum sebagai data penelitian. Setelah itu, isi hukum diuraikan secara kualitatif dan diadopsi metode preskriptif untuk menangani masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Landasan Teoritik

Ketidakberpihakan Hakim Teori dan/atau gagasan penguraian dan pemecahan kekuasaan harus ditemukan untuk mengetahui kerangka dasar atau dasar teori pembentukan kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi peradilan di lingkungan peradilan negara sebagai penyelenggara peradilan. Jika diperhatikan secara historis, pengertian kekuasaan kehakiman merupakan turunan atau turunan dari teori John Locke dan Montesquieu tentang pembagian atau pemisahan kekuasaan.

Dalam bukunya "Two Treaties of Government", John Locke berpendapat bahwa kekuatan suatu negara dibagi di antara beberapa organ dari berbagai entitas berdaulat. Menurut John Locke, sangat penting untuk menyebarkan kekuasaan di antara banyak organ negara untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang hanya terkonsentrasi pada satu organ dan untuk menjaga konsentrasi kekuasaan yang hanya ada di beberapa organ negara. Kekuasaan, menurut John Locke, diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori: Kekuasaan Legislatif 2. Kekuasaan Eksekutif Otoritas Federal 3. Karena kekuasaan eksekutif melibatkan kewenangan untuk mengadili sebagai bagian dari penegakan hukum. Ketiga organ lembaga kekuasaan negara tersebut memiliki tingkat kewenangan yang berbeda-beda, dengan kekuasaan yudikatif termasuk dalam porsi organ kekuasaan eksekutif (Sulityowati, 2017).

La Ode Husen berpendapat jika konsep pembagian kekuasaan John Locke merupakan reaksi terhadap absolutisme raja abad ke-14, ketika otoritas administratif di Eropa Barat terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu raja. Ide dalam mengakuisisi kewenangan membuat undang-undang dari tangan raja dan menempatkannya di tangan lembaga negara (Staatkundig organ) yang berdiri sendiri baru mulai muncul pada awal abad ke-17 (Utama & Saraswati, 2021).

Sebelumnya, pada akhir Abad Pertengahan, kekuasaan kehakiman dicabut terlebih dahulu dari tangan raja, baru kemudian kekuasaan kehakiman diberikan. Menurut tesis John Locke, pembentukan atau kehadiran kekuasaan kehakiman yang merupakan komponen bidang kekuasaan eksekutif disebabkan oleh kekuasaan raja yang tidak terbatas. Karena lembaga yudikatif berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, maka sudah sewajarnya kekuasaan eksekutif (Executive authority) yang semula milik raja dibatalkan, diambil alih, dan dipindahkan ke organ negara yang baru.

Menurut perspektif teoretis, kekuasaan raja yang pada mulanya diambil darinya merupakan kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh lembaga peradilan. baru kemudian kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan dicabut (legislatif). Penghapusan otoritas peradilan dari penguasa absolut bertepatan dengan lahirnya ide-ide Baron de Montesquieu, yang dia uraikan dalam "L'spirit des Lois," sebuah buku di mana dia menyajikan teori alternatif dari teori John Locke.

Menurut Montesquieu, penting untuk membagi otoritas negara menjadi tiga sumbu untuk membangun negara hukum yang demokratis. kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif, dan kewenangan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat aturan dan peraturan dikenal sebagai kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif, termasuk kewenangan penegakan hukum. Kekuasaan kehakiman (judikatif), yang meliputi kekuasaan dalam sistem peradilan dan kekuasaan dalam rangka menegakkan supremasi hukum. (Penegakan hukum). Tiga sumbu kekuasaan mengacu pada pembagian tiga wilayah kekuasaan negara, yang masing-masing berbeda dari yang lain baik dari segi subjek maupun fungsinya (Zaki, 2016).

Immanuel Kant, seorang mahasiswa Montesquieu, memberikan konsep tiga sumbu terpusat atau pusat-pusat kekuasaan negara yang berbeda dengan nama Trias Politica. Tri mengacu pada tiga sebagai pusat atau poros, sedangkan Politica mengacu pada kekuasaan. Teori Trias Politica berkaitan dengan Teori pembagian kekuasaan (Distribution of Power) dari John Locke dan teori pemisahan kekuasaan (Separation of Power) dari Montesquieu memberikan landasan bagi keadilan dan kekuasaan dalam menentukan bentuk sistem pemerintahan.

Paham Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dari Montesquieu dan Immanuel Kant memberikan landasan teoretis dan validitas otoritas yudisial yang diberikan oleh hakim dari berbagai pengadilan negara bagian sebagai entitas yang terpisah dan berpemerintahan sendiri dalam ranah kekuasaan kehakiman. Serbuan, campur tangan, dan campur tangan yurisdiksi lain.

Tesis Trias Politica ternyata tidak sepenuhnya dapat diterima sebagai praktik inkonstitusional sebagaimana yang sedang berkembang. Sulit untuk menerapkan teori ini secara keseluruhan karena, ketika sebuah negara berkembang, sebuah organ kekuasaan negara dapat diberikan lebih dari satu fungsi. Sebaliknya, suatu lembaga kekuasaan negara mampu

diberikan fungsi ganda, seperti halnya kekuasaan eksekutif disertai fungsi dalam bidang kekuasaan untuk menetapkan undang-undang dan peraturan (Andi, 2019).

Dalam praktik ketatanegaraannya, Amerika Serikat yang dianggap sebagai pionir penerapan konsep pemisahan kekuasaan negara memiliki sistem saling mengontrol dan pertimbangan timbal balik (Check and Balance System) antar otoritas nasional. Karena Kongres memiliki otoritas legislatif yang lebih sedikit, hak Veto Presiden atas tindakan yang diperkenalkan di Kongres Amerika sebenarnya membatasi penerapan tesis Trias Politica di Amerika Serikat. Dalam hal ini Ronald S. Lumbuun menyatakan bahwa asas pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan merupakan Salah satu tanda dan persyaratan pokok dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif yang bertugas membuat undang-undang, lembaga eksekutif yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan, lembaga kehakiman yang menjalankan proses peradilan dalam kasus pelanggaran hukum, serta lembaga administratif lainnya, semuanya diatur berdasarkan hukum yang berlaku.

Mengapa kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan secara fungsional oleh hakim peradilan harus merdeka serta bebas dari segala intervensi kekuasaan lain? Menurut Zubaedi, di negara-negara yang tidak menganut konsep TriasPolitica sekalipun, independensi hakim sebagai pewaris kekuasaan kehakiman tetap dihormati. Dengan demikian, teori Trias Politica memberikan landasan teoritis bagi independensi hakim dalam menjalankan kewenangan kehakimannya melalui peradilan Negara (Hukum et al., 2015).

B. Sistem Kekuasaan Kehakiman

Sistem hukum yang didirikan atau ditegakkan di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan kehakiman negara tersebut. Kodifikasi (hukum tertulis) ketentuan undang-undang yang dibentuk dan disahkan oleh negara melalui lembaga atau organisasi negara diperbolehkan menjadi acuan hukum utama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental.

DPR dan Presiden Indonesia adalah dua badan atau badan pemerintah yang memiliki yurisdiksi ini. Sumber hukum utama bagi negara-negara yang menggunakan sistem hukum Common Law, keputusan hakim di dalam yurisprudensi hukum adat sering dijadikan sebagai preseden yang diikuti oleh hakim lain ketika mengambil keputusan dalam perkara yang serupa.

Pengadilan diyakini sebagai pusat tindakan hukum di negara-negara yang mengikuti sistem ini, setidaknya secara teori. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memainkan peran penting dalam penciptaan undang-undang yang sebenarnya. Sistem hukum ini memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur kekuasaan kehakiman saat ini. Hal ini akan berdampak signifikan pada hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di negara-negara dengan aliran kodifikasi. Hal ini mengandung arti bahwa hakim selalu mengutamakan batasan-batasan perundang-undangan dalam menjalankan tugas yudisialnya. Hal tersebut juga akan mempengaruhi independensi hakim di negara-negara common law karena hakim merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dan senantiasa berpedoman pada common law (public practice), yang diwujudkan melalui yurisprudensi hakim dalam putusan pengadilan.

Menurut hasil penelitian para ahli hukum, kedua sistem hukum tersebut dalam perkembangannya memiliki manfaat yang saling menguntungkan satu sama lain. Akibatnya, tidak ada lagi perbedaan yang jelas antara kedua sistem hukum tersebut dalam praktiknya, yang juga mempengaruhi independensi. Hakim berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Di negara-negara yang menganut hukum perdata, ini berarti bahwa sistem peradilan tidak lagi terbatas pada sistem kodifikasi (Hukum Tertulis), tetapi lebih memungkinkan untuk referensi hukum tidak tertulis. Namun, sistem Common Law sama-sama rentan untuk menyimpang dari aturan berbasis presiden (Baihaki et al., 2020).

Perubahan paradigma sistem hukum ini memberikan kebebasan yang lebih besar kepada hakim untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya tanpa dibatasi oleh titik-titik referensi hukum yang dapat menjadi rekomendasi bagi mereka dalam memutuskan suatu perkara dalam rangka pemberesan yang berkeadilan.

C. Independensi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

MA dan MK semuanya memiliki kewenangan kehakiman yang otonom di bawah sistem ketatanegaraan Indonesia, yang mereka gunakan untuk menegakkan keadilan dan menegakkan supremasi hukum.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan khusus yang digunakan untuk menegakkan aturan hukum. Kekuasaan kehakiman diberikan dalam berbagai pengaturan, termasuk pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi. Kelompok lain yang berurusan dengan kekuasaan kehakiman menghadapi batasan hukum.

Wewenang suatu negara yang berdaulat dalam menjalankan sistem peradilan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan keadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dikatakan sebagai kekuasaan kehakiman., serta melaksanakan negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan Resmi Undang-Undang Nomor I Nomor 48 Tahun 2009 memberikan penjelasan lebih rinci tentang independensi peradilan dalam penyelenggaraan peradilan.

Sebuah negara yang didirikan di atas hukum dapat dianggap sebagai salah satu prinsip utama menjamin pemenuhan otoritas kehakiman yang independen dari pengaruh otoritas lain, untuk menjalankan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan menggunakan wewenangnya, hakim dan hakim konstitusi dituntut untuk menjaga independensi peradilan. Selain situasi yang dicakup oleh UUD 1945 Republik Indonesia, pihak luar tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam proses hukum.

Mahkamah Agung adalah puncak dari konfirmasi institusional dan vertikal sebelumnya dari independensi cabang yudisial. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dan kebal dari kendala politik dan lainnya untuk menjalankan tugasnya.

Hakim di lembaga peradilan menjalankan kekuasaannya di seluruh wilayah peradilan sesuai dengan independensi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai hukum pelaksanaan yang berlaku di bawahnya. Selain struktur kelembagaan pengadilan, hakim yudisial harus memiliki otonomi dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim tingkat banding dan tingkat banding.

Adjektiva “independen” dan “terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan”, menurut Jimly Asshidiqie, memiliki makna institusional dan fungsional. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilimpahkan kepada badan hukum yang tanggung jawab utamanya harus menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, tanpa alasan untuk menolak mengadili suatu perkara karena tidak ada atau ambigu dalam undang-undang. Dengan demikian, pengadilan berkewajiban untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan oleh orang yang meminta keadilan.

Pengadilan diharuskan untuk mempertimbangkan dan mengadili masalah tersebut berdasarkan undang-undang yang tidak ada atau ambigu, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Hakim diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi kekuasaan kehakiman yang

mendukung hukum dan keadilan tanpa campur tangan penguasa atau komponen lain yang tidak sesuai dengan tujuan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, hakim diharapkan untuk selalu melakukan penyidikan, memantau dinamika sosial, serta memahami standar hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki sifat yang independen, memiliki moralitas dan keadilan yang tinggi, jujur, dan memiliki pengetahuan yang luas di bidangnya. Mereka harus mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sebagai persyaratan untuk menjalankan tugasnya sebagai hakim independen yang mengutamakan supremasi hukum dan keadilan melalui sistem peradilan. Tugas mereka adalah untuk bertindak secara profesional dan sesuai dengan hukum dalam menjalankan tugas mereka.

Menjaga hukum dan keadilan sangat bergantung pada independensi lembaga peradilan. Sudah selayaknya jaminan pelaksanaan hukum dan keadilan tidak dapat dicapai tanpa independensi lembaga peradilan. Demokrasi dan supremasi hukum dengan peradilan yang independen berjalan beriringan secara konseptual dan praktis.

Tidak akan ada demokrasi atau negara berdasarkan aturan hukum tanpa peradilan yang independen dan kebebasan hakim untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan memutuskan kasus. Negara hukum yang demokratis harus memiliki peradilan yang tidak memihak. Hubungan ini tidak sepihak. Sebuah negara hukum dan demokrasi adalah kondisi yang diperlukan untuk peradilan yang independen. Dengan kata lain, demokrasi dan supremasi hukum saling bergantung pada peradilan yang independen. Hal ini mampu diilustrasikan bagai dua sisi mata uang.

Tujuan utama peradilan adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjadikan lembaga yudikatif sebagai lembaga tersendiri, mengembalikan peran fundamentalnya dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum, memenuhi perannya sebagai pengawas lembaga negara lainnya, serta memajukan, memfasilitasi, dan menegakkan prinsip-prinsip rule of the rule. Demokrasi diperlukan untuk menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui kedaulatan rakyat.

Independensi hakim dan lembaga peradilan merupakan tujuan independensi peradilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri. Institusi kekuasaan kehakiman harus otonom secara organisasional dan bebas dari segala campur tangan dan pengaruh kekuatan pemerintahan lainnya. Dalam kerangka ini, hakim dilarang menyerahkan kewenangan

kehakimannya kepada ideologi dan kepentingan politik tertentu. Kekuasaan yudikatif harus dipisahkan secara ketat dari otoritas negara lainnya, terutama cabang eksekutif dan legislatif, untuk memberikan check and balances politik.

Presiden mampu mengintervensi dan mencampuri urusan pengadilan untuk keperluan revolusi, kehormatan bangsa dan negara, atau urusan umum yang mendesak. Ayat ini hanya berarti bahwa Presiden berwenang mengintervensi proses peradilan atas nama negara, bangsa, atau urusan umum yang krusial.

Bagian ini memberdayakan presiden untuk memulai prosedur peradilan atas nama melindungi negara, negara bagian, atau kepentingan publik yang penting. Di sisi lain, terdapat struktur administratif untuk melibatkan dan mengkooptasi kekuasaan kehakiman. Kementerian Kehakiman, Kementerian Agama, dan Departemen-departemen di lingkungan Angkatan Bersenjata memiliki yurisdiksi atas organisasi, administrasi, dan pendanaan semua pengadilan, meskipun Mahkamah Agung adalah mahkamah agung.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menggantikan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya dan menghapuskan peran tegas Presiden dalam mengintervensi kewenangan teknis kehakiman di lembaga peradilan, telah dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat kekuasaan kehakiman. Peradilan yang mandiri yang tidak dipengaruhi oleh entitas negara lain. Meskipun tidak dapat disangkal, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap merupakan kooptasi administratif kekuasaan kehakiman Indonesia karena peran eksekutif dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pendanaan pengadilan (Utama & Saraswati, 2021).

Keinginan masyarakat untuk memiliki kekuasaan kehakiman yang otonom dan bebas dari segala macam campur tangan semakin berkembang. Karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang otonom, maka dipandang penting untuk menciptakan pemisahan yang jelas antara tugas yudikatif dan eksekutif guna mewujudkan peradilan yang mandiri dan mandiri. dari kekuasaan pemerintah.

Kemudian, sebagai pengganti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang lama, diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menetapkan batasan waktu untuk mengintegrasikan organisasi, administrasi, dan dana yang sebelumnya diawasi oleh masing-masing departemen.

Sebagai hasil dari reformasi yang terus berjalan dan komitmen kuat masyarakat untuk mempertahankan supremasi hukum, telah dibentuk lembaga kekuasaan kehakiman baru bernama Mahkamah Konstitusi selain Mahkamah Agung. (MK). Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang mengawasinya menjalankan kewenangannya pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.

D. Merajut Independensi Peradilan

Secara kontekstual, independensi peradilan bisa diartikan sebagai segala faktor atau kondisi yang mendukung sikap batin hakim, yang bebas mengungkap dan kemudian mengungkapkan nuraninya terhadap keadilan selama proses persidangan. Isu pembatasan kemerdekaan diproyeksikan akan merusak sistem hukum kita, mencederai bahkan mencabik-cabik rasa keadilan rakyat. Bahkan, dikotomi kaya versus miskin hampir selalu menentukan ruang lingkup masalah independensi peradilan.

Menurut pola pemetaan ini, ada atau tidaknya independensi peradilan ditentukan oleh tiga faktor: integritas (kapasitas mental dan fisik) hakim, infrastruktur yang mendukung komponen juri, dan ketersediaan sistem peradilan.

Skenario peningkatan kesejahteraan peradilan didasarkan pada pengetahuan tentang adanya tiga (tiga) faktor penentu independensi peradilan. Sekalipun kehadirannya yang parsial tidak serta merta dan secara spontan mengubah wajah keadilan dalam sekejap, penerapan rasionalisasi pendapatan/kesejahteraan hakim mau tidak mau akan terserap dan kemudian diaktualisasikan sebagai fundamental utama sekaligus katalis dalam percepatan perbaikan hukum. tiga aspek (faktor) yang menentukan independensi lembaga peradilan.

Ketika mempertimbangkan integritas hakim sebagai faktor pertama, lingkup "mentalitas" dan "kemampuan" (keterampilan dan kompetensi ilmiah) hakim sebagai subyek keadilan dibahas. Ranah inilah yang selama ini dibenarkan dalam beberapa analisis sebagai biang kebobrokan peradilan di negeri ini. Sintesis ini tampaknya didukung oleh banyaknya penangkapan hakim yang menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berbagai temuan survei yang menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat pada lembaga keadilan.

Perlu dicatat bahwa "faktor integritas hakim" mencakup aspek intrinsik dari "mentalitas", yang lebih abstrak dan sulit dinilai dalam praktik. Hal ini selain memperkuat "capability" sebagai aspek internal yang masih terukur dan terprediksi dalam konteks

rekrutmen sejak awal. Ini lebih subyektif dan sepenuhnya didasarkan pada sikap batin hakim (niat dan keinginan pribadi), berlawanan dengan indikator obyektif, yang lebih bersifat pribadi, sehingga setelah hakim melakukan tugasnya, penilaian tentang baik buruknya sikap dalam arti baru akan dirasakan sepenuhnya (to judge) (Baihaki et al., 2020).

Berdasarkan pengetahuan tentang mentalitas dalam ciri-cirinya sebagai komponen intrinsik, jelaslah bahwa kita membutuhkan sistem yang dapat memastikan mentalitas lurus hakim selama masa jabatannya. Tidak diragukan lagi bahwa semua orang akan setuju bahwa derajat kesejahteraan, selain komponen lainnya, tidak dapat diabaikan jika semua pihak jujur dan tidak memihak dalam memandang hal ini tanpa perlu penelitian atau kajian. yang cukup menantang.

Lainnya antara lain adanya aparat pengawasan yang ketat dan terintegrasi, serta bentuk pembimbingan berkala yang keras dan terorganisir. (dengan janji mekanisme reward and punishment). Hal ini sejauh ini telah diabaikan dan tampaknya sengaja dibayangi oleh masalah reformasi peradilan lainnya. Tanpa berusaha mengecilkan makna penyatuan lembaga peradilan, memang benar bahwa penegasan paradigma pemisahan kekuasaan masih bersifat parsial. Sekalipun signifikan, kehadiran Komisi Yudisial harus dilihat sebagai langkah signifikan dan mendesak. Namun, jika tidak dibarengi dengan upaya bersama untuk meningkatkan integritas sumber daya manusia, langkah monumental ke arah reformasi peradilan tersebut terasa hampa dan seringkali membuahkan hasil yang tidak efektif, baik pada tataran kerangka berpikir logis maupun dalam praktik di lapangan.

Implementasi PP No. 94 Tahun 2012 yang merupakan wujud realitas dari tanggapan baik pemerintah terhadap meningkatnya tekanan terhadap hakim di seluruh tanah air sehubungan dengan permintaan peningkatan kesejahteraan hakim. Hal ini pada dasarnya merupakan bagian terakhir dari teka-teki yang melengkapi rencana reformasi peradilan dalam strategi keseluruhan mewujudkan Mahkamah Agung yang mandiri. Ini dalam rangka menjaga kredibilitas hakim.

Selain itu, tersedianya infrastruktur untuk mendukung kerja hakim yang bebas dan diperlakukan secara bermartabat menjadi faktor kedua yang mempengaruhi independensi lembaga peradilan. Dalam pengertian ini, infrastruktur pendukung mengacu pada komponen struktur dan sistem operasi pengadilan yang membantu dan mendukung hakim dalam menjalankan kewajiban peradilannya. Selanjutnya, ketersediaan infrastruktur pendukung harus

dipandang sebagai seperangkat norma hukum dan budaya hukum yang mendukung kewajiban dan independensi hakim sejalan dengan penerapan teori sistem Lawrence M. Friedman.

Untuk menjalankan kekuasaan kehakimannya, seorang hakim tentu membutuhkan bantuan dan bantuan sistem peradilan, lembaga peradilan, bahkan sekretariat lembaga peradilan. Kebobrokan sistem dan sikap sumber daya manusia di bidang ini niscaya akan berdampak pada seberapa cepat hakim menjalankan kewajiban peradilannya, bahkan dalam skala yang sangat besar, keadaan tersebut berpotensi mengancam independensi lembaga peradilan itu sendiri.

Bentuk penguatan integritas sistem peradilan yang dimaksud harus dilaksanakan menggunakan strategi yang serupa dengan pola penguatan integritas hakim yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu dengan menitikberatkan pada upaya peningkatan kesejahteraan, melakukan pembinaan rutin terhadap hal-hal teknis dan profesional, serta pembentukan mekanisme pengawasan yang ketat. Integritas para hakim dan elemen pendukung lainnya di dalam sistem peradilan dapat ditingkatkan untuk mencapai sebuah budaya penegakan hukum yang tegas dan berwibawa, yang ditandai dengan integritas yang tinggi, kejujuran dan penghormatan terhadap nilai-nilai keadilan.

Meningkatnya derajat budaya penegakan hukum di lembaga peradilan sebagai subjek penegakan hukum juga akan memberikan pengaruh percepatan yang besar terhadap peningkatan budaya penegakan hukum secara keseluruhan. Karena jelas bahwa pada tahap ini aparat penegak hukum peradilan akan menciptakan perlawanan atas seluruh macam penipuan dan kegiatan kotor di semua tahapan proses peradilan, sebenarnya penentangan terhadap korupsi adalah perlawanan terhadap korupsi yang sesungguhnya (Ulya, 2016).

Wajar jika sikap dan perlawanan seluruh sistem peradilan tetap bertahan. Paradigma dan cara berpikir masyarakat akan bergeser, khususnya para pencari keadilan, yang harus beralih dari paradigma dan budaya berpikir yang terkesan pesimis terhadap proses peradilan jika tidak disertai dengan suap dan/atau bentuk penipuan lainnya menjadi paradigma dan budaya berpikir yang optimis tentang kesucian. Dari prosedur hukum dan memasukkan sikap tabu terhadap segala perbuatan curang dalam melanjutkan proses peradilan yang bersangkutan. Suatu pola pergeseran pemikiran yang bila didukung oleh tersedianya seluruh norma yang mendukung dan menegaskan berlakunya independensi peradilan, baik pada tataran norma fundamental maupun standar substantif terkait, norma elaborasi/peraturan pelaksanaan teknis,

sampai dengan norma etika yang menekankan batas-batas perwujudan maksud kemerdekaan pengadilan dimaksud.

E. Analisis Kasus Suap Hakim Agung

Di Indonesia kasus suap sudah menjadi rahasia umum, yang dimana pelaku suap bukan hanya dari tokoh masyarakat saja melainkan bisa juga terjadi pada penegak hukum, seperti hakim. Hakim dalam menjalankan wewenang dan tugas nya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hakim tersebut melanggar wewenang dan tugas nya maka akan mendapatkan sanksi dan dianggap menyelewengkan kode etik dari profesi hakim (Kamil, 2006).

Hakim memiliki kualitas independensi, yang berarti bahwa mereka tidak dapat memiliki pengaruh asing pada pengambilan keputusan mereka ketika melaksanakan tugas mereka dan menjalankan wewenang mereka. Hakim memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk menggunakan penilaiannya dalam menjalankan tugasnya sekaligus membuat penilaian tentang perkara (Andi, 2019).

Namun, walaupun sudah adanya independensi hakim tetap saja banyak hakim melakukan pelanggaran. kasus pelanggaran yang terjadi pada hakim contohnya suap menyuap, kasus suap sering sama artikan dengan hadiah yang diberikan oleh pihak kedua atau uang sogok yang diberikan untuk memperlancar untuk tujuan tertentu terutama pada lalu lintas hukum.

Hakim Sudrajat Dimiyanti dari Mahkamah Agung dituduh melakukan penyuapan dalam salah satu kasus terbaru. SD tersangka dalam kasus ini dituduh menerima uang sekitar Rp800 juta melalui ETP. DY mencairkan dana atas nama SD; SD sebelumnya telah menerima uang dari YP dan ES sebesar sekitar SGD 202.000 (sekitar Rp2,2 miliar). Putusan tersebut terkait dengan pengajuan mosi putusan sela dalam perkara perdata yang melibatkan operasional Koperasi Simpan Pinjam ID, di mana diduga uang yang diberikan YP dan ES kepada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS (Ilham, 2023).

Tersangka SD diduga melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 sampai 1 KUHP atas perbuatannya, bersama dengan DY, ETP, MH, NA, dan AB sebagai pihak penerima.

Tim Investigasi akan memeriksa tersangka HT dan IDKS, dan KPK akan segera menjadwalkan kehadiran mereka. KPK juga akan melihat klaim tambahan DY dan lainnya yang menerima uang dari pihak berperkara Mahkamah Agung lainnya.

F. Kekuasaan Kehakiman di Dunia Internasional

Kebutuhan akan independensi kekuasaan kehakiman telah menarik perhatian masyarakat dunia. Banyak negara telah menjadi tuan rumah konferensi regional dan internasional mengenai masalah independensi peradilan, yang telah menghasilkan sejumlah piagam, deklarasi, dan prinsip panduan.

“Setiap orang berhak atas pengadilan yang adil, terbuka, kompeten, independen, dan tidak memihak,” bunyi Pasal 10 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun Piagam PBB tidak memiliki definisi yang jelas tentang independensi yudisial, konvensi ini menjadi dasar bagi perjanjian regional dan internasional selanjutnya yang menekankan perlunya independensi yudisial.

Kedua, Prinsip Siracuse (1981) menunjukkan independensi peradilan di mana setiap hakim bebas untuk memberikan keputusan berdasarkan bukti yang dia kumpulkan dan pemahamannya tentang hukum, bebas dari pengaruh atau tekanan yang tidak semestinya dari sumber manapun, langsung atau tidak langsung. Selain itu, pengadilan yang bebas dari pengaruh eksekutif dan legislatif serta memiliki yurisdiksi atas semua hal yang terkait dengan keadilan, baik secara langsung maupun melalui hak untuk memeriksa, juga diperlukan.

Ketiga, International Bar Association mensponsori New Delhi Standards (1982), yang diadakan atas saran mereka. Bagian ini, yang menekankan bahwa individu hakim harus memiliki independensi personal dan substantif, diharapkan dapat mewakili norma minimum independensi peradilan. Dalam rangka menjamin bahwa hakim individu tidak dalam kendali presiden, syarat dan ketentuan layanan peradilan harus mendapatkan perlindungan yang setara. Sebaliknya, independensi substantif menunjukkan bahwa seseorang secara eksklusif terikat pada hukum dan hati nuraninya ketika menjalankan tugas yudisialnya sebagai hakim. Selain itu, peradilan secara keseluruhan harus otonom dan terpisah dari pemerintah. Seorang hakim harus bersikap tidak memihak terhadap sesama hakim dan pihak lain baik selama proses pengambilan keputusan maupun secara umum.

Keempat, Pasal 2 Prinsip Dasar Independensi Peradilan PBB menyatakan bahwa Kejaksaan harus mengambil keputusan dalam perkara secara tidak memihak, berdasarkan

hukum dan fakta, dan tanpa campur tangan dari pihak manapun atau karena sebab apapun, baik langsung maupun tidak langsung.

Deklarasi ini menekankan kode etik profesi peradilan, akuntabilitas, dan transparansi keuangan. Baik dimensi individual maupun institusional dari independensi peradilan dinyatakan dalam deklarasi tersebut. Ada dua pendekatan untuk menjamin independensi individu lembaga peradilan, yang pertama adalah melindungi hakim dari bahaya sehingga tidak takut atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Kedua, proses pemilihan hakim dan standar etika yang mengaturnya harus dibuat sedemikian rupa sehingga mengurangi kemungkinan korupsi dan pengaruh luar.

Kelima, Prinsip Perilaku Peradilan Bangalore. Terlepas dari kurangnya definisi spesifik tentang independensi peradilan, kesepakatan tersebut menguraikan sejumlah prinsip yang sangat penting untuk pemenuhan independensi tersebut. Di berbagai negara, cita-cita ini dianggap penting dalam perkembangan perilaku peradilan. Kemandirian, ketidakberpihakan, kejujuran, kesopanan, keadilan, kompetensi, dan ketekunan adalah beberapa contoh dari kebajikan ini.

Konsepsi Pancasila dan UUD 1945 yang melarang seluruh wujud pengaruh dari internal dan eksternal kekuasaan kehakiman memberikan landasan yang paling kuat bagi kemandirian peradilan di Indonesia. Konsepsi Pancasila sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai kerangka kehidupan bernegara merupakan landasan hukum yang esensial dan operasional bagi kemandirian lembaga peradilan yang diperlukan untuk mempertahankan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud. menjadi.

Upaya merusak independensi pengadilan sering dilakukan, baik secara historis maupun praktis. Namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin berkembang, demikian pula cara-cara mengintervensi kekuasaan kehakiman. Setidaknya ada dua jenis dimensi intervensi yang terjadi: dimensi dikronis dan sinkronis. Intervensi diakronis mengacu pada intervensi terhadap proses mental hakim yang dipengaruhi oleh masa lalu. Intervensi sinkronis, di sisi lain, adalah semacam intervensi yang mendesak hakim untuk mengikuti opini populer dan tren saat ini. Kondisi hakim itu sendiri, maupun struktur internal kekuasaan kehakiman, dapat berdampak pada independensi lembaga peradilan. Intervensi internal dapat membahayakan independensi peradilan karena kepemimpinan manajemen yang

tidak efektif, prosedur dan struktur pengawasan, dan koordinasi sistem pembinaan (Suherman, 2019)

KESIMPULAN

Sistem hukum yang didirikan atau ditegakkan di suatu negara tidak dapat dipisahkan dari struktur kekuasaan kehakiman negara tersebut. Kodifikasi (hukum tertulis) ketentuan undang-undang yang dibentuk dan disahkan oleh negara melalui lembaga atau organisasi negara diperbolehkan menjadi acuan hukum utama bagi negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman menjamin negara akan independensi hakim dalam menjalankan tugasnya. Pengadilan negeri mempunyai kekuasaan kehakiman untuk mengadili dan memutus perkara demi kepentingan hukum dan keadilan. Asas pemisahan kekuasaan memberikan landasan dan legitimasi bagi pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman oleh hakim melalui pengadilan negeri. Upaya merusak independensi pengadilan sering dilakukan, baik secara historis maupun praktis. Namun seiring berjalannya waktu dan kesadaran masyarakat terhadap hukum semakin berkembang, demikian pula cara-cara mengintervensi kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Universitas Islam Bandung, 1995.
- Baihaki, Muhammad Reza, Fathudin Fathudin, and Ahmad Tholabi Kharlie, 'Problematisasi Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy) Masa Jabatan Hakim Konstitusi', *Jurnal Konstitusi*, 17.3 (2020), 652–75
- Bushtami, Dachran, 'KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA', *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 46 No.4, oktober 2017
- Hukum, *Jurnal Ilmu*, Pascasarjana Universitas, Syiah Kuala, Eza Aulia, Mahdi Syahbandir, Magister Ilmu, and others, 'DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI HAKIM', 3.2 (2015), 46–54
- I Gusti Ketur Irawan, 'Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan kehakiman', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol.39, No.4. Desember 2010
- Iham Oktavian, 'Sidang Perdana Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimiyati Digelar Besok', Selasa 14 Februari 2023, Detiknews.

- Irianto, Sulityowati, 'Problematika Hakim Dalam Organisasi Peradilan Dan Praktik', *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan Dan Masyarakat Di Indonesia : Studi Sosio-Legal*, 2017, 77
- Kamil, Iskandar. 'Kode Etik Profesi Hakim' dalam *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)*, Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006.
- Konsorsium Reformasi Hukum Nasional dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan. Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 1999.
- Kusumohamidjojo, Budiono , 1999, Ketertiban yang Adil, *Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo
- Monica Ayu Caesar Isabela, 'Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia', 18 Februari 2022, Kompas.com.
- Nasrullah, Nasrullah, 'Putusan Hakim terhadap Pemberian Sanksi di Bawah Batas Minimal Pada Tindak Pidana Narkotika', *SIGN Jurnal Hukum*, (2020)
- Nurul Qamar, Salle, Amiruddin, Kaharuddin Syah Y. Dt. Amas, Rusli Dg. Palabbi, Andi Suherman, & Farah Syah Rezah. (2018). *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN).
- Pasha Yudha Ernowo, ' Kasus Suap Hakim Agung Sudrajat Dimyati Segera Disidangkan', Kamis 9 Februari 2023, Infopublik.
- Priskap, Ridham, ' *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*', JIUBJ, Februari 2020.
- Satyanegara,Ery, 'Kebabasan Hakim Memutus Perkara Dalam Konteks Pancasila (Dintinjau Dari Keadilan Substantif)', *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol.44, No.4, Oktober 2013
- Suherman, Andi, 'Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman', *SIGN Jurnal Hukum*, 1.1 (2019), 42–51
- Tasrif, S. ' *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*' dalam *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Editor Paul S. Baut dan Luhut M.P. Pangaribuan. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989.
- Ulya, Zaki, 'PEMBATALAN KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM REKRUTMEN HAKIM DIKAITKAN DENGAN KONSEP INDEPENDENSI HAKIM (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015)', 28.3 (2016), 482–96
- Utama, Rico Yodi Tri, and Retno Saraswati, 'Independensi Dan Urgensi Restrukturisasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berdasarkan Aspek Kekuasaan Kehakiman', *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2021), 53–70